

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi usaha perfilman di Indonesia juga pertumbuhannya semakin meningkat pesat. Melihat kepada pertumbuhan industri perfilman yang meningkat pesat sangat membanggakan namun disisi lain juga mengkhawatirkan. Perkembangan dan pertumbuhan industri film nasional selama ini, pada dasarnya, belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada kontribusi industri film terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015, industri film hanya menyumbang sekitar 0,16% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara, ketika itu, rata-rata sektor industri kreatif mampu menyumbang 6,03% terhadap PDB Indonesia.

Industri film nasional dapat bertumbuh subur bila pangsa pasarnya semakin meningkat. Peningkatan jumlah penonton film lokal tentu menjadi hal positif. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan film nasional bisa menguasai 50% pasar perfilman dalam negeri pada tahun 2022. Untuk mencapai target itu, pemerintah pun siap mensponsori para pelaku perfilman nasional untuk bekerja sama dengan para pelaku perfilman internasional dalam memproduksi film berkualitas yang akan semakin banyak menarik hati penonton.

Meski demikian, dari sisi pelaku industri film, Cinema 21 memproyeksikan pangsa pasar film nasional tahun ini lebih rendah dari target pemerintah, yakni 37%. Proyeksi tersebut didasarkan pada perhitungan

pangsa pasar film lokal pada 2017 yang hanya berada di angka 35%, dengan jumlah penonton sebesar 42,7 juta penonton. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016, di mana jumlah penonton film Indonesia berada di angka 37,2 juta.

Untuk itu dalam rangka mendorong industri film nasional, salah satu upaya pemerintah adalah membuka Daftar Investasi Negatif (DNI) yang semakin memperluas kesempatan para investor untuk berinvestasi di bidang tersebut. Hal ini, menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas pasar film nasional dan mendapatkan pengalaman dari luar dalam hal kontribusinya untuk industri perfilman.

Meningkatnya jumlah penonton tersebut juga didorong oleh faktor meningkatnya layar film di Indonesia. Jika di tahun 2012 ada 609 layar film, maka di akhir 2017 jumlah layar film sudah mencapai 1.412 layar. Meningkatkan jumlah layar film tersebut juga memberikan kesempatan pada banyak film-film lokal untuk dapat bertahan lebih lama di bioskop. Palsnya, menurut Bekraf, salah satu penyebab sulitnya meningkatkan pangsa pasar film nasional adalah karena minimnya jumlah layar. (Sumber:<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/peningkatan-pasar-film-nasional-dalam-mendukung-industri-film-indonesia>)

Mengingat juga kepada substansi cerita yang semakin luas dan berlebihan, ini akan memberikan dampak negatif yang cukup besar apabila kita tidak bisa mengantisipasi film-film yang ada di pasaran. Dampak negatif

yang bisa saja terjadi pada saat kita tidak mengantisipasi film-film yang ada dipasaran yang pertama adalah kita bisa saja melakukan kekerasan dalam dunia nyata akibat dari film yang kita tonton.

Oleh karena itu Lembaga Sensor Film (LSF) mencanangkan gerakan Budaya Sensor Mandiri untuk mengatasi dampak dari tsunami tontonan yang terjadi di era media baru saat ini. Budaya Sensor Mandiri merupakan gerakan penumbuhan budaya dalam masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan kategori usia. Tumbuh dan mengakarnya gerakan ini dalam masyarakat menjadi penting karena ada peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar yang menjadi penyaring utama dalam menentukan tontonan mana yang layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan sebuah lembaga negara independen nonstruktural, Lembaga Sensor Film (LSF) menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yaitu, melakukan penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum, menentukan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum serta menentukan penggolongan usia penonton film. Dalam pelaksanaan tugas ini pula LSF memiliki salah satu fungsi yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film. (sumber: <https://lsf.go.id/sejarah/>)

Namun, proses penyensoran film dan iklan film yang dilaksanakan oleh Lembaga Sensor Film yang dimaksud untuk uji kelayakan untuk film atau iklan

film itu seringkali menimbulkan beberapa opini antara lembaga sensor film (LSF) dan para pembuat film. Bahkan setelah film atau iklan film tersebut lulus sensor dan di tayangkan, justru banyak opini negatif yang diberikan khalayak kepada Lembaga Sensor Film (LSF) tentu hal ini berdampak kepada citra LSF itu sendiri. Masih banyak yang menganggap bahwa LSF adalah tukang potong film, tukang gunting film dan masih banyak stigma lain dari khalayak untuk Lembaga Sensor Film. (sumber: laman komentar instagram @lsf.ri)



Salah satu contoh Respon negatif khalayak tentang Lembaga Sensor Film bisa di lihat di atas. Dalam laman komentar instagram LSF, ada khalayak masyarakat yang memberikan komentar negatif terhadap Lembaga Sensor Film. Seperti yang diketahui bahwa setiap lembaga pasti memiliki citranya masing-masing karena itu merupakan salah satu aset penting yang perlu diperhatikan. Citra juga memberikan penilaian positif dan eksistensi

perusahaan dimata publik, yaitu dengan menunjukkan pandangan khalayak terhadap lembaga dalam jangka panjang.

Pada era digital seperti saat ini, masyarakat memiliki banyak cara alternatif untuk mengakses konten film, terutama yang berbasis pada jaringan informatika, baik berupa layanan Over The Top (OTT) maupun Video on Demand (VoD). Namun, kenyataannya belum semua film yang berbasis internet ditayangkan melalui proses penyensoran. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi Lembaga Sensor Film (LSF) untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia.

Atas dasar itulah, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia akhirnya mengedepankan program Budaya Sensor Mandiri (BSM). Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyebarkan informasi sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Targetnya, program ini dapat menjadi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan salah satu persiapannya adalah dengan membentuk Desa Sensor Mandiri. (sumber: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/lsf-dorong-kemandirian-masyarakat-dalam-memilah-dan-memilih-film>)

Program Budaya Sensor Mandiri merupakan salah satu program unggulan dari Lembaga Sensor Film yang sudah di canangkan sejak tahun 2018 dan siap menjadi sebuah gerakan nasional yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya memilah memilih tontonan sesuai dengan usia

masing-masing. Hal ini diwujudkan oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia secara nyata dan masif di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan.

Sepanjang Agustus hingga September tahun 2021 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia telah menggelar talk show baik melalui media televisi maupun radio, juga secara langsung kepada masyarakat di berbagai daerah dalam rangka peningkatan literasi Budaya Sensor Mandiri.

Tabel 1.1 Talkshow Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Literasi Budaya Sensor Mandiri

No	Media	Narasumber	Kota/Tanggal
1.	Radio One 88.6 FM	Andi Muslim (Ketua Subkomisi Media Baru LSF) Rita Sri Hastuti (Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi LSF)	Cilegon (10/8)
2.	iNews TV	Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF) Joseph Samuel Krishna (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF)	Medan (11/8)
3.	Radio Megaswara 91.4 FM	Hafidhah (Sekretaris Komisi I LSF) Fetrimen (Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi LSF)	Serang (12/8)
4.	Jambi Express TV	Nasrullah (Ketua Komisi I LSF) Mukayat Al-Amin, (Sekretaris Komisi III LSF)	Jambi (13/8)
5.	Radio MGT 101.1 FM	Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF)	Bandung (7/9)

		Joseph Samuel Krishna, (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF)	
--	--	---	--

Sumber: <https://lsf.go.id/lembaga-sensor-film-gencarkan-budaya-sensor-mandiri-melalui-berbagai-program/>

Tidak hanya itu, sosialisasi Budaya Sensor Mandiri juga menyasar wilayah Barat Indonesia dengan gelar kegiatan bertajuk “Kolaborasi Budaya Sensor Mandiri Bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,” di Bukittinggi (5/8). Turut hadir narasumber Naswardi, Ketua Komisi III Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Mukayat Al Amin, Sekretaris Komisi III Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dan Noorca M. Massardi, Ketua Subkomisi Dialog Lembaga Sensor Film. Kegiatan ini mengusung tema “Urgensi dan Internalisasi Nilai-nilai Budaya Sensor Mandiri dalam Tridharma Perguruan Tinggi.” Meski berlangsung secara luring, kegiatan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang dilaksanakan secara massif di beberapa daerah ini mendapat sambutan yang sangat baik di kalangan masyarakat. Melalui gerakan literasi ini juga diharapkan masyarakat semakin bijak dalam menentukan tontonan mana yang pantas ditonton atau tidak sesuai usia masing-masing. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat dan juga para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menggalakkan Budaya Sensor Mandiri. (sumber: <https://lsf.go.id/lembaga-sensor-film-kembali-mengadakan-sosialisasi-budaya-sensor-mandiri-serentak-di-tiga-lokasi/>)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut;

1. Apa yang menyebabkan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia memiliki citra negatif ?
2. Bagaimana upaya Lembaga Sensor Film membangun citra lembaganya ?
3. Bagaimana Manajemen Kampanye Public Relations Budaya Sensor Mandiri pada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah penelitian yaitu Manajemen Kampanye Public Relations Budaya Sensor Mandiri pada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian pada skripsi ini dirumuskan “Bagaimana Kampanye Public Relations Budaya Sensor Mandiri pada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis situasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan sensor film
2. Mengetahui dan mengeksplorasi Perencanaan Kampanye Public Relations Budaya Sensor Mandiri dalam Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

3. Mengetahui dan mengeksplorasi Pelaksanaan Kampanye Public Relations Budaya Sensor Mandiri dalam Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
4. Mengetahui dan mengeksplorasi pelaksanaan Evaluasi Kampanye Public Relations dalam membangun citra Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya terkait citra suatu perusahaan serta dapat dijadikan sumber tambahan pada penelitian lanjutan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana proses manajemen kampanye humas terkait budaya sensor mandiri guna membangun citra lembaga sensor film.